

ABDI DALEM DAN ABDI NEGARA: IDENTITAS GANDA SENIMAN- PRIYAYI KEMLAYAN SURAKARTA 1950-AN-1970-AN

ROYAL SERVANT AND STATE SERVANT: DOUBLE IDENTITY OF ARTIST- PRIYAYI IN KEMLAYAN, SURAKARTA, 1950s-1970s

Heri Priyatmoko

Kolumnis Solo Tempo Doeloe di Media Massa

Pos-el: heripri_puspari@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas identitas seniman priyayi di Kemlayan, Surakarta pada masa periode post-kolonial. Keraton Kasunanan tidak mempunyai otoritas untuk mengikat *abdi dalem* untuk melayani raja sesudah masa kemerdekaan. Raja tidak dapat menjamin keuangan *pangrawit* di Kemlayan. Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah strategi politis kultural yang digunakan komunitas seniman-priyayi di Kemlayan untuk menghadapi era yang berubah? Bagaimanakah identitas mereka setelah kelas sosial dihapus?

Dengan keahlian dalam seni, priyayi-seniman di Kemlayan bergabung dengan lembaga kesenian milik pemerintah Indonesia untuk menjadi abdi negara. Mereka membantu Keraton Kasunanan dengan bergabung dalam acara-acara tradisional. Kemudian mereka mendapat identitas baru tanpa kehilangan identitas sebelumnya sebagai *abdi dalem*. Mereka juga mempertahankan atribut priyayi mereka. Strategi yang digunakan priyayi-seniman di Kemlayan membawa hasil positif. Mereka mempunyai identitas ganda dan peran fungsional sebagai seniman tetap bertahan meskipun hegemoni keraton menghilang. Orientasi kerja mereka tidak lagi melayani raja. Sekarang mereka melayani rakyat di bidang kebudayaan sesuai rencana pemerintah. Identitas mereka sebagai priyayi diakui rakyat dan pemerintah sebagai penghormatan atas sumbangsih mereka.

Kata kunci: seniman, abdi dalem, hegemoni, identitas, priyayi

Abstract

This article explains the identity of artist-*priyayi* in Kemlayan, Surakarta during the post-colonial period. Kasunanan court did not have the authority to keep *abdi dalem* to serve the king after the independence of Indonesia. The king could not guarantee the finance of *pangrawit* in Kemlayan. The question to respond the situation is what cultural political strategy was used by the artist-*priyayi* community in Kemlayan to deal with the changing era? How was their identity after the social class was omitted?

With expertise in art, the artist-*priyayi* in Kemlayan joint art institution that belonged to the Indonesian government to become *abdi negara*. They were helping Keraton Kasunanan by joining in traditional events. Then they got new identity without losing their the previous one, as *abdi dalem*. They also kept their *priyayi's* attributes. Strategy that was used by the artist-*priyayi* in Kemlayan brought a positive outcome. They have double identity and the functional role as artists remained although *keraton* hegemony was gone. Their work orientation was not serving the king anymore. Now they serve people in culture sector according the government's plan. Their identity as *priyayi* was admitted by the people and government as respect for their contribution.

Keywords: artists, *priyayi*, *abdi dalem*, hegemony, identity

A. Pendahuluan

Pada masa Paku Buwana XI (1939-1945), Keraton Kasunanan mengalami kesulitan di sektor keuangan. Pemerintah Belanda mendadak mengurangi anggaran belanja kerajaan besar-besaran, karena terjadi perubahan status dari *vassal* (tanah kerajaan) melebur menjadi wilayah Hindia Belanda secara permanen. Pemangkasan *budget* dikerjakan bertahap dengan mempertimbangkan jumlah pejabat tingkat rendah bergaji sedikit yang bakal terkena imbas hematisasi. Sesuai perjanjian, anggaran dipotong sampai sekitar seperempat dalam bulan pertama dan berangsur-angsur akan dipangkas lebih besar di tahun berikutnya hingga separuh (Larson, 1990:300-301).

Bergulirnya kebijakan pahit ini membuat pihak kerajaan hanya mampu menghidupi *abdi dalem* secara pas-pasan. Kaum bangsawan pun terpaksa memasuki fase serba hemat, sederhana, dan meninggalkan kebiasaan hidup mewah. Paku Buwana XI tidak sanggup berbuat banyak dengan situasi tersebut. Akhirnya, dilakukan pemangkasan jumlah pegawai keraton secara besar-besaran. Kondisi itu meresahkan *kawula dalem*, termasuk *abdi dalem niyaga* yang diminta berhenti bekerja sementara waktu (Waridi, 2001:58). Aksi pemecatan ini dapat dimaknai sebagai tanda merosotnya kewibawaan Paku Buwana XI, Raja gagal menyelamatkan bawahannya dari badai masalah keuangan. Imbas buruknya adalah perasaan hormat dan taat, kekaguman, dan pengabdian *abdi dalem* kepada raja berkurang.

Badai kedua adalah lahirnya negara Republik Indonesia tahun 1945, dan terlebih setelah pecahnya gerakan antistapraja tahun 1946, Keraton Kasunanan sudah tidak lagi memiliki ruang kekuasaan, baik dalam pengertian geografis maupun politis. Tinggallah bangunan istana yang merupakan sumber kebudayaan Jawa lahiriah maupun batiniah. Dalam kedudukan yang demikian ini, pewaris dinasti Mataram Islam tersebut tidak punya otoritas mengontrol *abdi dalem*, termasuk

kelompok *abdi dalem niyaga* yang bermukim di kampung Kemlayan. *Abdi dalem niyaga* ini pada dasarnya masuk dalam kategori kelompok sosial priyayi, sebagai kompensasi atas kesediaan mereka mengabdikan kepada keraton.

Keberadaan seniman-priyayi Kemlayan di tengah melemahnya kondisi keraton ini menjadi permasalahan menarik untuk dikupas. Apakah status sosial sebagai priyayi dan peran fungsional mereka sebagai seniman juga ikut tamat bersamaan hancurnya hegemoni keraton? Selain itu, strategi politik kultural apa yang ditempuh komunitas seniman-priyayi Kemlayan untuk melewati perubahan zaman dan mempertahankan kehidupan sosial-ekonominya? Bagaimana juga identitas mereka setelah dihapusnya stratifikasi sosial bangsawan-priyayi-*wong cilik* seiring tumbangannya kekuasaan keraton?

Untuk memahami dinamika sejarah komunitas seniman-priyayi Kemlayan Surakarta dan keterkaitan mereka dengan kekuasaan negara Republik Indonesia, dipakailah sumber sejarah. Beberapa sumber primer dalam penelitian ini, di antaranya surat keputusan, piagam penghargaan, *kekancingan*, foto sezaman, dan arsip lain yang relevan. Komunitas seniman-priyayi Kemlayan tidak banyak meninggalkan dokumen mengenai riwayat hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan lisan dari berbagai pihak terkait.

B. "Angkat Kaki" dari Keraton

Pergantian sistem pemerintahan dari kerajaan ke Republik Indonesia tahun 1945 membawa pengaruh besar dalam kehidupan Keraton Kasunanan, termasuk lingkungan *abdi dalem*. Keraton yang sebelumnya begitu kuat mengontrol kehidupan *abdi dalem* lambat laun mengurangi intervensinya. Keraton juga tak sanggup lagi memberi jaminan kehidupan mapan. Berdirinya Republik membuka peluang masyarakat umum untuk berkembang. Alhasil, kehidupan di luar lingkungan keraton mulai menawarkan pilihan hidup yang lebih baik bagi para seniman.

Kondisi tersebut memancing *abdi dalem niyaga* keraton keluar dari lingkungan yang sebelumnya menjadi prioritas hidup mereka. Mereka ingin bebas dari kekangan pihak istana. Selain hendak mencari penghidupan yang lebih layak di luar tembok keraton, para pemusik istana juga berupaya keras mengembangkan dan menyebarkan kemampuan yang dimilikinya kepada publik. Mereka berkemauan mengajarkan kesenian karawitan dan tari gaya Surakarta yang merupakan hasil dari patronase penguasa keraton.

Para *pangrawit* dan seniman tari yang “angkat kaki” dari istana bermaksud mengajarkan *gending* dan tari klasik gaya Surakarta kepada masyarakat karena didasari oleh kegelisahan bahwa para empu andalan dari keraton makin lama makin habis dikikis usia, selain pertimbangan pragmatis. Jika para empu tetap di dalam keraton, tidak ada penyebaran pengetahuan dan keterampilan perihal *gending* dan tari klasik. Di titik ini, *abdi dalem* seniman tidak hanya memaknai kesenian tradisional sebagai kebutuhan, tetapi juga pengajaran sebagai hal yang urgen bagi kelestarian *gending* Jawa dan tarian klasik gaya Surakarta (Tranggono, 1990).¹

Bagai gayung bersambut, pemerintah pusat saat mendirikan Konservatori Karawitan (KOKAR) membutuhkan orang-orang yang sudah berpengalaman atau terampil memainkan alat musik gamelan Jawa untuk menjadi pengajar. Sementara, orang yang pandai bermusik yang tidak lain adalah *abdi dalem niyaga* keraton itu mengharapkan sebuah payung atau lembaga guna merealisasikan mimpi menularkan kepandaian berkesenian kepada publik secara lebih sistematis dan terorganisasi.

Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pada periode awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai penguasa dan pengelola negara, mengadopsi model birokrasi kerajaan dengan

sedikit pembaruan dan mengubah orientasi. Diketahui bahwa fungsi *abdi dalem* melayani raja dalam hubungan atas-bawah yang bersifat konsentris membuat kedudukan birokrasi dalam negara patrimonial hanya merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan raja. Birokrasi tidak melayani masyarakatnya, melainkan melayani kepentingan raja (1994: 184-193).

Pemerintah nasional Indonesia yang masih berumur muda ini memberi definisi baru pada birokrasi beserta mekanismenya, yaitu *abdi dalem* keraton yang kemudian menjadi abdi negara itu diminta fokus melayani masyarakat, bukan penguasa. Etos pelayanan diperbesar ketimbang etos kekuasaan, untuk mencegah terjadinya refeodalisasi. Pengangkatan abdi negara tidak berdasarkan kualifikasi genealogis, tetapi berdasar kriteria rasional. Hal berbeda dengan para *abdi dalem* yang diangkat karena kemurahan raja.

Abdi dalem yang berasal dari kampung Kemlayan yang direkrut pemerintah pusat menjadi abdi negara dan diberi kesempatan menularkan ilmu di lembaga KOKAR, yakni empu karawitan Warsadinigrat, Mlayawidada, Warsapangrawit, Djoyomlaya, Hadipurwoko, Karyopradangga, Gunopangrawit, Yasapradangga, Martapangrawit, Parsono, Mlayareksaka, dan baru belakangan empu tari S. Ngaliman Tjondropangrawit.

Sebelum berdirinya KOKAR tempat *pangrawit* Kemlayan bekerja, beberapa dari mereka telah membanting tulang membantu pemerintah Republik Indonesia. Di satu pihak, mereka masih tetap mengabdikan kepada Keraton Kasunanan walau tingkat loyalitasnya menurun, tidak seperti zaman keemasan Paku Buwana X. Sekitar tahun 1947-1948, mereka masuk di Kantor Karesidenan sebagai staf karawitan, akan tetapi tidak maksimal dalam mencurahkan pikiran serta keahliannya lantaran *job* deskripsinya belum tertata rapi dan iklim bekerja kantoran belum terbangun

1 Buku resmi terbitan pemerintah (TVRI) tersebut mengulas profil seniman Kemlayan, yakni Mlayawidada dan S. Ngaliman Tjondropangrawit yang semasa hidupnya sama-sama mengalami kegelisahan dan berusaha mengenalkan karawitan dan tari pada masyarakat.

(Wawancara Diyem, Surakarta, 2010). Mafhum bahwa model pemerintahan Karesidenan belum mapan, sebab masih tahap ujicoba sebagai pengganti sistem pemerintahan tradisional kerajaan di Surakarta yang sedikit memperoleh dukungan massa.

C. Kontestasi Memperebutkan Seniman Kemlayan

Kisah *abdi dalem niyaga* mendaftar menjadi pegawai diceritakan oleh Mlayawidada. Suatu ketika, ia memperoleh informasi dari tetangga sebelah rumahnya, Ndoyopradangga. Dikabarkan bahwa di Kantor Karesidenan Surakarta membutuhkan tenaga *pangrawit*. Tanpa sepengetahuan pihak Keraton Kasunanan, Mlayawidada mengajak Martapangrawit, Warsopangrawit, dan Puspopalito mendaftarkan diri. Karena kantor ini membutuhkan tenaga *pangrawit* dan pihak Karesidenan sudah mendengar kepiawaian mereka menabuh gamelan, keempat seniman ini langsung diterima menjadi staf karawitan tanpa melewati tes wawancara dan uji kemampuan. Selain mempunyai kepandaian menabuh gamelan, mereka berempat ditarik sebagai staf karawitan kantor Karesidenan Surakarta agar lebih bebas dalam membantu perjuangan gerilya. Saat revolusi fisik, rumah Mlayawidada memang dipakai untuk penitipan senjata dan perlengkapan gerilya lainnya.² Sebagai kompensasinya, mereka akan mendapat gaji Rp 250 per bulan. Untuk perbandingan, upah sehari-hari bekerja sebagai *abdi dalem niyaga* dibayar oleh keraton "hanya" sebesar Rp 10 per bulan. Tanggal 1 Mei, Mlayawidada resmi diangkat menjadi pegawai kantor Residen Surakarta.³

Berita mereka bekerja di tempat yang baru ini sampai juga ke telinga pembesar keraton. Prabuwinoto sebagai *pengangeng Amongraras* atau pemimpin *niyaga* keraton, melayangkan

surat kepada Mlayawidada, Martapangrawit, Warsopangrawit, dan Puspopalito. *Layang* tersebut berisi teguran dan keempat seniman itu diminta tegas memilih Keraton Kasunanan atau Kantor Karesidenan Surakarta. Karena pertimbangan finansial dan faktor ambuknya hegemoni keraton, teguran ini direspon seniman Kemlayan dengan memutuskan tetap mencari sesuap nasi di Kantor Karesidenan Surakarta. Mereka menghadap Prabuwinoto dan menyatakan diri ingin berhenti dari profesi *abdi dalem niyaga*. Mengingat sulitnya mencari figur pengganti dan orang lama yang paham *gending-gending* Jawa gaya Surakarta, *pengangeng parentah* keraton memberi kelonggaran, yakni tugas mereka di dalam istana tetap dilaksanakan dan pekerjaan di Kantor Karesidenan Surakarta dipertahankan demi mencukupi kebutuhan hidup (Saptono, 1998:33-35).

Keputusan tersebut disetujui oleh keempat *pangrawit* dari Kemlayan ini dengan senang hati, meski di sisi lain mungkin terasa pahit bagi keluarga Keraton Kasunanan sebab merasa dilecehkan oleh bawahannya yang lancang berbuat demikian. Dalam perspektif keluarga keraton, mungkin sekali muncul pemikiran bahwa bagaimana pun *abdi dalem niyaga* ini telah bertahun-tahun *ngawula* dan dibesarkan oleh Keraton Kasunanan sejak periode Paku Buwana X hingga Paku Buwana XII. Tentu harapan yang dibangun petinggi keraton adalah aspek loyalitas atau kesetiaan para *abdi dalem* semestinya dijaga kendati zaman berubah.

Dari realitas sejarah ini dapat ditafsirkan bahwa selepas kemerdekaan, terjadi suatu kontestasi atau ajang adu kekuatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan petinggi Keraton Kasunanan demi mendapatkan atau memperebutkan seniman-seniman

2 Selain mempunyai kepandaian menabuh gamelan, mereka berempat ditarik sebagai staf karawitan kantor Karesidenan Surakarta agar lebih bebas dalam membantu perjuangan gerilya. Saat revolusi fisik, rumah Mlayawidada memang dipakai untuk penitipan senjata dan perlengkapan gerilya lainnya. Baca Moch. Nursjahid, "S. Mlayawidada Pemegang Anugerah Seni 1979", dalam *Minggu Ini Suara Merdeka* 16 September 1979.

3 Surat Keputusan Residen Surakarta No 13/5k/Kar 29 November 1948. Tahun 1970, Mlayawidada resmi pensiun dengan golongan I dan menerima gaji sebulan Rp 1.170. Periksa Arsip Surat Pensiun dan Tunjangan Kepala Kantor Urusan Pegawai RI 16 Maret 1970.

Kemlayan. Hasil kontestasi antara dua kekuasaan tersebut secara jelas dimenangkan oleh pemerintah Republik Indonesia lantaran lebih mampu menjamin kehidupan para seniman Kemlayan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Dipahami pula bahwa pascakemerdekaan, posisi tawar *abdi dalem niyaga* relatif tinggi sebab memiliki keahlian menabuh gamelan yang mumpuni. Bermodal kemampuan itulah, para *pangrawit* dapat menentukan pilihan siapa majikannya, karena posisinya memang sangat dibutuhkan oleh penguasa untuk alat legitimasi kekuasaan di ranah kebudayaan. Dengan mempunyai dua majikan, berarti dapat dinyatakan bahwa identitas seniman Kemlayan tersebut ganda, yaitu sebagai *abdi dalem* sekaligus abdi negara.

Seniman Kemlayan yang terakhir ditarik oleh pemerintah pusat untuk membagikan ilmunya di KOKAR Surakarta, yaitu S. Ngaliman Tjondropangrawit. Tahun 1952, pangkat S. Ngaliman sebagai *abdi dalem niyaga* di Keraton Kasunanan naik menjadi *abdi dalem Lurah Miji* pengendang dengan nama *kekancingan* Tjondropangrawit. Baru tahun 1956, S. Ngaliman diangkat pegawai negeri pada KOKAR (Haryono, 1997:55).

Tidak semua seniman Kemlayan terwadahi di instansi KOKAR. Sebagai contoh, Gunapangrawit dipercaya sebagai *pangrawit rebab* dikelompokkarawitan Riris Raras Iramadi bawahanungan Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta. Kemudian Turahyo Harjomartono, *didapuk* (ditunjuk) sebagai *pangrawit kendang* di RRI Surakarta dan mengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dengan mata pelajaran Praktik Karawitan Surakarta II.⁴ Di Akademi Karawitan Surakarta (ASKI), Turahyo juga diminta untuk membagikan ilmunya tentang Tabuh Sendiri Gender bersama Martapangrawit dan Mlayawidada.⁵ Meski telah menerima penghasilan dari luar keraton, ia masih merangkap sebagai *abdi*

dalem Keraton Kasunanan seperti layaknya KRT. Warsadiningrat, Mlayawidada, Warsopangrawit, Yasapradangga, Djoyomlaya, Hadipurwoko, Karyopradangga, Martapangrawit, Parsono, dan Mlayareksaka.

D. Kreativitas yang Tak Tumpul

Di tempat kerja baru yang ini, kreativitas seniman tidak tumpul, malah kian berkembang. Mlayawidada, misalnya, berhasil mendokumentasikan notasi *gending* Jawa gaya Surakarta 3 jilid. *Gending-gending* yang dimuat dalam tiga jilid buku itu dikumpulkan dari catatan *abdi dalem niyaga* Keraton Kasunanan yang tinggal di Kemlayan, yaitu KRT. Warsadiningrat, R.Ng. Purwapangrawit, R.Ng. Mlayasutedja, dan R.Ng. Djoyomlaya.

Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah 1270 komposisi musikal (*gending*) Jawa gaya Surakarta sebagai warisan budaya yang begitu berharga berhasil didokumentasikan dalam bentuk notasi *balungan gending*. Ketiga jilid buku tersebut sampai sekarang digunakan sebagai acuan utama masyarakat karawitan Jawa gaya Surakarta, terutama bagi pendidikan formal. Dalam perkembangannya, seiring dengan semakin meningkatnya lulusan Kokar dan ASKI Surakarta yang berasal dari luar daerah dan menyebar ke kota-kota di Jawa, sebagian notasi repertoar *gending* yang tercatat dalam buku itu ikut mengalir pula ke berbagai kelompok karawitan di beberapa kota dan daerah, bahkan hingga ke mancanegara (Waridi, 2008:78).

Berkat keberadaan *abdi dalem niyaga* keraton yang berkiprah di KOKAR dan ASKI, membawa dampak positif dalam penyebaran pengetahuan karawitan terutama gaya Surakarta. Sebagaimana yang diutarakan Sumarsam bahwa semenjak didirikan KOKAR dan ASKI, pelajaran praktik gamelan selalu mendapat ajaran dan bimbingan dari *pangrawit-pangrawit* keraton yang terkenal. Lulusan dari sekolah ini mempunyai catatan-

4 Arsip Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta tentang Daftar Tenaga Luar Biasa Pada ISI Yogyakarta 1979.

5 Arsip Keputusan Pimpro ASKI No. 0120/PAK-I/K/76-77 Tanggal 17 Mei 1977.

catatan notasi yang diperoleh sewaktu mereka belajar. Sumber timbulnya notasi berasal dari para *pangrawit* keraton yang mengajar dan melayani mereka. Lulusan dari kedua sekolah tersebut telah tersebar luas, bahkan sampai di luar Jawa maupun di luar negeri (termasuk Sumarsam sendiri) yang tugasnya kebanyakan mengajar atau membimbing seni karawitan. Sudah selayaknya kalau mereka akan mengajar berdasarkan catatan atau buku yang dipunyai (Sumarsam, 1976:1).

Abdi dalem pembuat gamelan dari Kemlayan, R.Ng. Yasapradangga juga ditarik oleh pemerintah di KOKAR. Pada permulaan berdirinya KOKAR, pemerintah memang sangat berkepentingan dengan beliau dalam program pengembangan *kawruh* atau teknik membuat dan merawat gamelan. Tujuan utama Yasapradangga bersedia mengabdikan di KOKAR adalah ingin mewariskan ilmu yang dimilikinya kepada generasi muda, mumpung pemerintah telah memberi jalan yang strategis. Di tempat inilah, kreativitas Yasapradangga kian tumbuh dan terdorong untuk mengembangkan diri. Yasapradangga resmi pensiun dari tugas mengajar di KOKAR pada tahun 1959 (Hardjoprasanto, 1997:55-56).

Selain mengajar di kelas, seniman-priyayi Kemlayan ditugaskan menjalin hubungan dengan masyarakat luar lewat jalur kesenian. Berikut ini rincian tugas dan peran nyata staf pengajar di KOKAR di dunia luar, melalui berbagai kegiatan berikut.

1. Mengadakan pergelaran wayang kulit guna menunjukkan kepentingan kedudukan karawitan dalam pedalangan.
2. Mendampingi para siswa Konservatori mengadakan siaran karawitan di RRI studio Surakarta.
3. Dua kali dalam sebulan staf karawitan pada Konservatori melayani siaran dan masyarakat.
4. Bulan Mei 1951 Konservatori membantu Himpunan Budaya Surakarta untuk melayani Himpunan Kebudayaan Kabupaten di Lumajang.

5. Bulan Mei 1952 Konservatori mengirimkan beberapa orang pegawai ke Nganjuk untuk membantu Krida Langen Budaya di sana.
6. Sejak Juli 1951 hingga kini (1956) Konservatori mengirimkan beberapa orang pegawai ke Kediri sebulan sekali dan tiga hari berturut-turut melatih kader pedalangan dan karawitan pada Kebudayaan Nasional Pancasila di sana (Departemen Penerangan, 1956:453-454).

E. Simpulan

Dari paparan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa meski para *abdi dalem niyaga* berasal dari kampung Kemlayan adalah produk masa lalu Keraton Kasunanan, mereka dapat bertahan dari terpaan zaman kendati kekuatan patron mereka sudah dinyatakan ambruk dengan lahirnya negara Republik Indonesia. Para bangsawan keraton “bertumbangan” dan tidak siap menyongsong zaman baru karena tidak mempunyai strategi dan alat (kepandaian) untuk mengikuti perubahan zaman. Kondisi berbeda justru dialami seniman-priyayi Kemlayan. Berbekal keahlian seni dan setia hidup di jalur kesenian, *abdi dalem niyaga* tersebut mulai masuk di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dipilih menjadi patron utama oleh komunitas seniman-priyayi Kemlayan sebab mampu memberikan jaminan ekonomi dan status sosial. Di lain pihak, tugas-tugas di keraton tidak sepenuhnya mereka tinggalkan.

Dengan bekerja di lembaga pemerintah Republik Indonesia dan melayani masyarakat, mereka justru memperoleh identitas baru tanpa harus meninggalkan identitas lama sebagai *abdi dalem* Keraton Kasunanan berikut simbol kepriyayian yang mereka miliki (gelar, bahasa, dan rumah). Masyarakat dan pemerintah tidak menyoal atribut atau simbol yang dikenakan seniman-priyayi Kemlayan berkesinambungan kendati stratifikasi sosial telah terhapus. Sebaliknya, masyarakat dan pemerintah malah segan terhadap mereka

karena pelayanan terhadap masyarakat dan kerja kulturalnya cukup nyata, serta menjadi rujukan publik yang berkeinginan mempelajari kesenian tradisional gaya Surakarta. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka pun beridentitas ganda. Hal itu suatu bukti "kemenangan" atau kesuksesan *abdi dalem niyaga* beradaptasi dengan zaman yang telah berubah.

Keputusan komunitas seniman-priyayi Kemlayan memilih menjadi tenaga pengajar di lembaga-lembaga kesenian pemerintah merupakan strategi politik kultural yang cerdas. Mereka konsisten menekuni dunia kesenian dan membawa dampak positif bagi mereka. Lewat lembaga yang didirikan pemerintah inilah, seniman Kemlayan tetap dapat eksis, berkreasi, dan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seniman-priyayi kampung Kemlayan memberi kontribusi yang besar bagi pengaderan lahirnya seniman karawitan yang andal. Selain itu, mereka mengembangkan karawitan yang berkembang di keraton ke luar tembok keraton dengan memberi kesempatan masyarakat luas untuk belajar dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan menguasai karawitan gaya Surakarta. Hal itu berarti, peran fungsional mereka sebagai seniman tetap berjalan kendati zaman telah berubah. Orientasinya tidak melayani raja lagi, melainkan melayani masyarakat seperti yang dikehendaki pemerintah.

Daftar Pustaka

Aliyah, Istijabatul. 2002. "Landasan Konsep Konservasi Kampung Kemlayan Sebagai Kawasan Seni dan Budaya Jawa di Surakarta." *Tesis*. Semarang: Program Magister Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro.

Hardjoprasonto, Soemardjo. 1997. *Bunga Rampai Seni Tari Solo*. Jakarta: Taman Mini Indonesia Indah.

Haryono, 1997. "S. Ngaliman Tjondropangrawit: Dari Seorang Pengrawit Menjadi Empu

Tari Sebuah Biografi." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan UGM.

- Kuntowijoyo. 1994. *Demokrasi & Budaya Birokrasi*. Yogyakarta: Bentang.
- Larson, George D. 1990. *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1914*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nursjahid, Moch. 1979. "S. Mlayawidada Pemegang Anugerah Seni 1979," dalam *Minggu Ini Suara Merdeka* 16 September.
- Radjiman. 1984. *Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat*. Surakarta: Toko Buku Krida.
- Saptono. 1998. "Mloyowidodo Sebagai Sumber Sejarah Lisan: Sebuah Biografi." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan UGM.
- Sumarsam. 1976. *Kendangan Gaya Solo*. Surakarta: ASKI.
- Tranggono, Indra. dkk. 1990. *30 Profil Budayawan Indonesia*. Yogyakarta: TVRI.
- Waridi. 2001. *Martapangrawit Empu Karawitan Gaya Surakarta*. Yogyakarta: Mahavhira.
- Waridi. 2008. *Gagasan dan Karya Tiga Empu Karawitan: Pilar Kehidupan Karawitan Jawa Gaya Surakarta 1950-1970-an (Ki Martapangrawit, Ki Tjakrawarsita, Ki Nartasabda)*. Bandung: Etnoteater Publisher, BAAC, Pascasarjana ISI Surakarta.

Arsip

- Surat Keputusan Residen Surakarta No 13/5k/Kar 29 November 1948.
- Surat Keputusan Pimpro ASKI No. 0120/PAK-I/K/76-77 Tanggal 17 Mei 1977.
- Surat Pensiun dan Tunjangan Kepala Kantor Urusan Pegawai RI 16 Maret 1970.
- Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta tentang Daftar Tenaga Luar Biasa Pada ISI Yogyakarta 1979.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia Provinsi Djawa Tengah. Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1956

Wawancara

- Wawancara Diyem, Surakarta, tahun 2010.